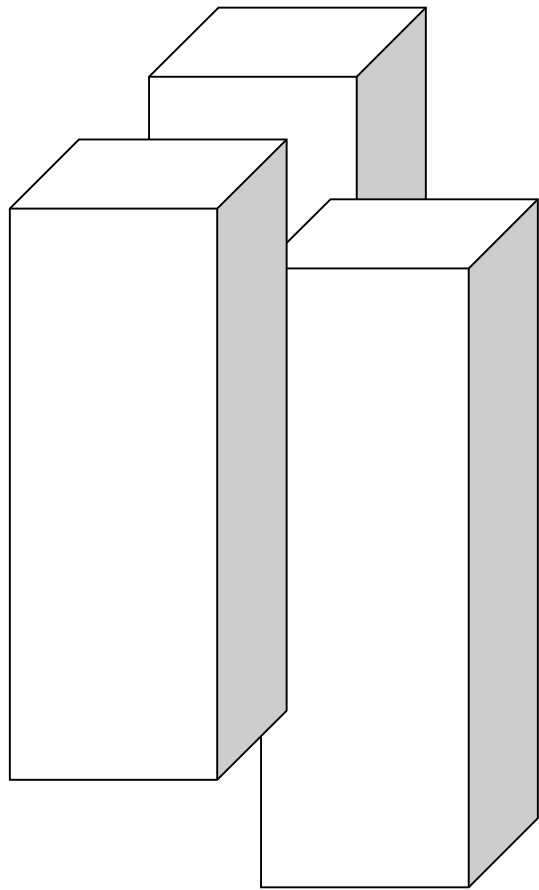


PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO**



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 9/ TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan target kinerja dan anggaran pada program/kegiatan/sub kegiatan, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025;

Mengingat.....

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 Nomor 030);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025.
2. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025.
5. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
7. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II....

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Perubahan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (3) Penjabaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025;
 - c. BAB III : RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - d. BAB IV : PENUTUP.
- (4) Penjabaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Lampiran I : Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
 - b. Lampiran II : Perubahan Renja Dinas Kesehatan.
 - c. Lampiran III : Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - d. Lampiran IV : Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
 - e. Lampiran V : Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja.
 - f. Lampiran VI : Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - g. Lampiran VII : Perubahan Renja Dinas Sosial.
 - h. Lampiran VIII : Perubahan Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
 - i. Lampiran IX : Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - j. Lampiran X : Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - k. Lampiran XI....

- k. Lampiran XI : Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- l. Lampiran XII : Perubahan Renja Dinas Perhubungan.
- m. Lampiran XIII : Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- n. Lampiran XIV : Perubahan Renja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- o. Lampiran XV : Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- p. Lampiran XVI : Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- q. Lampiran XVII : Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- r. Lampiran XVIII : Perubahan Renja Dinas Perikanan.
- s. Lampiran XIX : Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- t. Lampiran XX : Perubahan Renja Dinas Peternakan.
- u. Lampiran XXI : Perubahan Renja Sekretariat Daerah.
- v. Lampiran XXI.1 : Perubahan Renja Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- w. Lampiran XXI.2 : Perubahan Renja Bagian Hukum.
- x. Lampiran XXI.3 : Perubahan Renja Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan.
- y. Lampiran XXI.4 : Perubahan Renja Bagian Pengadaan Barang/ Jasa.
- z. Lampiran XXI.5 : Perubahan Renja Bagian Organisasi.
- aa. Lampiran XXI.6 : Perubahan Renja Bagian Umum.
- bb. Lampiran XXII : Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- cc. Lampiran XXIII : Perubahan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- dd. Lampiran XXIV : Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- ee. Lampiran XXV : Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah. ✕
- ff. Lampiran XXVI : Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. 4
- gg. Lampiran XXVII : Perubahan Renja Inspektorat Daerah. 9

hh. Lampiran XXVIII....

- hh. Lampiran XXVIII : Perubahan Renja Kecamatan Lobalain.
- ii. Lampiran XXIX : Perubahan Renja Kecamatan Rote Barat Laut.
- jj. Lampiran XXX : Perubahan Renja Kecamatan Rote Barat Daya.
- kk. Lampiran XXXI : Perubahan Renja Kecamatan Rote Barat.
- ll. Lampiran XXXII : Perubahan Renja Kecamatan Rote Selatan.
- mm. Lampiran XXXIII : Perubahan Renja Kecamatan Rote Tengah.
- nn. Lampiran XXXIV : Perubahan Renja Kecamatan Pantai Baru.
- oo. Lampiran XXXV : Perubahan Renja Kecamatan Rote Timur.
- pp. Lampiran XXXVI : Perubahan Renja Kecamatan Ndao Nuse.
- qq. Lampiran XXXVII : Perubahan Renja Kecamatan Landu Leko.
- rr. Lampiran XXXVIII : Perubahan Renja Kecamatan Loaholu.
- ss. Lampiran XXXIX : Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (5) Penjabaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Perubahan Renja Perangkat Daerah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 30 Juni 2025
BUPATI ROTE NDAO,

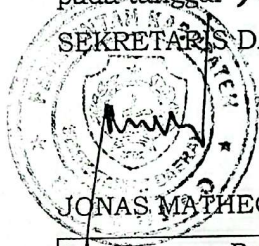
Mengesahkan
Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

PAULUS HENUK, SH
NIP. 19760214 200604 1 005



Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 30 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



JONAS MATHEOS SELLY

Paraf Hierarki	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bapelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 NOMOR 041



LAMPIRAN XXI.4

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE

NDAO TAHUN 2025

Ita Esa

2002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Karunia-Nya maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan rencana yang disusun sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao. Rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 ini tentunya masih belum sempurna, oleh karena itu apabila ada saran-saran yang membangun demi kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 ini sangat diharapkan. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Perubahan Rencana Kerja Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.

Ba,a, 30 Juni 2025

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Setda Kabupaten Rote Ndao



Joni A. Adu, ST

Pembina

NIP. 19840615 201001 1 023

DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025.....	5
2.2 Reviu Program/kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN.....	13
3.1 Analisis Perubahan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
3.2 Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	13
BAB IV PENUTUP.....	18

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Evaluasi Renja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025.....	6
Tabel 2.2	Tabel Realisasi Keuangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2025 s/d Bulan Mei 2025.....	11
Tabel 3.1	Perubahan Kinerja Pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2025.....	13
Tabel 3.2	Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2025 s/d Bulan Mei 2025.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih/kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang mengacu pada Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025. Proses penyusunan Perubahan Renja Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 adalah melalui tahap Penyusunan Rancangan Perubahan Renja, Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja dan Penetapan Perubahan Renja Bagian PBJ Tahun 2025. Perubahan Renja Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao.

Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Dokumen Perubahan Renja Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 dan Renstra Bagian PBJ Setda Tahun 2025 – 2029. Perubahan Renja Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 disusun sebagai dasar penyusunan RKA Perubahan Bagian PBJ Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan – permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan

tujuan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao yaitu **terwujudnya tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.**

1.2 Landasan Hukum

Beberapa produk hukum yang menjadi landasan penyusunan Renja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/1317 Tahun 2023 Tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Timur Nomor 005);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 006);
13. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 0422);
14. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 077) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 Nomor 024);
15. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao; (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 Nomor 001);
16. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 Nomor 030).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 dimaksudkan menyesuaikan target kinerja dan kerangka pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan perangkat daerah.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.
2. Menjadi landasan penyusunan kebijakan operasional bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.
3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perubahan Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025
- 2.2 Reviu Program/kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Analisis Perubahan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 maka perangkat daerah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 melalui mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.

Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan melaksanakan 1 (satu) urusan penunjang yaitu urusan perekonomian dan pembangunan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025. Melalui 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan dukungan anggaran belanja sebesar Rp.845.586.000,-. Namun dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Bagian PBJ Tahun 2025 mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025. Sehingga rincian anggaran Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 39.929.772,- atau (4,40%) dapat di lihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Evaluasi Renja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD/Renstra 2025 s/d tahun 2029			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d tahun (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD/APBD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/ Renstra s/d Tahun 2029 (%)	
										I									
1	2	3	4			5		6		7		11=7+8+9+10		12=11/6*100		13 = 5 + 11		14 = 13/4*100	
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	URUSAN WAJIB																		
	Bagian PBJ																		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100	%	886.479.000			100	177.295.800	50	21.694.422	50	21.694.422	50,00	12,24	50	21.694.422	50,00	2,45
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100	%				100		11,11		11,11		11,11		11		11,11	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100	%				100		22,22		22,22		22,22		22		22,22	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	%				100		40		40		40,00		40		40,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD/Renstra 2025 s/d tahun 2029			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d tahun (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD/APBD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/ Renstra s/d Tahun 2029 (%)	
										I									
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	19	Dokumen	16.430.000			12	3.286.000	6	3.286.000	6	3.286.000	50,00	100,00	6	3.286.000	31,58	20,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35	Dokumen															
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi perangkat daerah	60	Dokumen	16.430.000			12	3.286.000	6	3.286.000	6	3.286.000	50,00	100,00	6	3.286.000	10,00	20,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	216.900.000			100	43.380.000	25	-	25	-	25,00	0,00	25	-	25,00	-
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60	Dokumen	216.900.000			12	43.380.000	3	-	3	0	25,00	0,00	3	0	5,00	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	21.000.000			100	4.200.000	25	-	25	-	25,00	0,00	25	-	25,00	-
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	60	Dokumen	21.000.000			12	4.200.000	3	-	3	0	25,00	0,00	3	0	5,00	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD/Renstra 2025 s/d tahun 2029			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d tahun (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD/APBD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/ Renstra s/d Tahun 2029 (%)	
										I									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100	%	478.219.000			100	95.643.800	11	12.868.422	11,11	12.868.422	11,11	13,45	11	12.868.422	11,11	2,69
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10	Paket	118.325.000			2	23.665.000			0	0	0,00	0,00	0	0	-	-
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	10	Paket	47.579.000			2	9.515.800			0	0	0,00	0,00	0	0	-	-
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25	Laporan	312.315.000			5	62.463.000	1	12.868.422	1	12.868.422	20,00	20,60	1	12.868.422	4,00	4,12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	Laporan	5.200.000			100	1.040.000	16,67	1.040.000	16,67	1.040.000	16,67	100,00	17	1.040.000	166,67	20,00
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60	Laporan	5.200.000			12	1.040.000	2	1.040.000	2	1.040.000	16,67	100,00	2	1.040.000	3,33	20,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	25	Unit	148.730.000			5	29.746.000	2	4.500.000	2	4.500.000	40,00	15,13	2	4.500.000	8,00	3,03

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD/Renstra 2025 s/d tahun 2029			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d tahun (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD/APBD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/ Renstra s/d Tahun 2029 (%)	
										I									
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	10	Unit	131.230.000			2	26.246.000		3.000.000	0	3.000.000	0,00	11,43	0	3.000.000	-	2,29
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	17.500.000			3	3.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	66,67	42,86	2	1.500.000	13,33	8,57
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	24,53	Skor	3.341.451.000			16,62	668.290.200		18.235.350	0	18.235.350	0,00	2,73	0	18.235.350		0,55
		Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)	15,88	Skor				8,82											
		Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)	40,00	Skor				17,78											
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa melalui e-procurement	100	%	3.341.451.000			100	668.290.200	7,69	18.235.350	7,69	18.235.350	7,69	2,73	8	18.235.350	7,69	0,55
15	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	20	Dokumen	2.117.855.000			4	423.571.000	2	10.917.000	2	10.917.000	50,00	2,58	2	10.917.000	10,00	0,52

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD/Renstra 2025 s/d tahun 2029			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d tahun (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD/APBD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/ Renstra s/d Tahun 2029 (%)	
										I									
16	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	20	Dokumen	1.163.846.000			4	232.769.200	2	7.318.350	2	7.318.350	50,00	3,14	2	7.318.350	10,00	0,63
17	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	220	orang	59.750.000			44	11.950.000		-	0	0	0,00	0,00	0	0	-	-
Rata-rata Capaian Target Kinerja (%)					4.227.930.000				845.586.000	18,42	39.929.772	18,42	39.929.772	25,28	23,38	18,42	39.929.772	5,06	4,68
Predikat Kinerja														SR	SR			SR	SR

2.2. Reviu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab Rote Ndao sampai dengan bulan Mei 2025 mengacu pada Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025. Perubahan Pagu Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao Rp.845.586.000,- menjadi Rp.769.016.750,- berkurang sebesar Rp.75.569.250,- atau 8,93% dengan realisasi sampai bulan Mei sebesar Rp.205.282.522,- atau 26,69%.

Realisasi Keuangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Tabel Realisasi Keuangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2025 s/d Bulan Mei 2025

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDUK TAHUN 2025 (RP)	ANGGARAN PERBUP 24 TAHUN 2025			
			PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%	SISA ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7 = 4 - 5
4.01.0.00.0.00.08.0006	BELANJA DAERAH	845.586.000	769.016.750	205.283.522	26,69	563.733.228
4.01.0.00.0.00.08.0006	BELANJA LANGSUNG	845.586.000	769.016.750	205.283.522	26,69	563.733.228
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	177.295.800	123.106.550	77.201.972	62,71	45.904.578
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.286.000	3.286.000	3.286.000	100,00	-
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.286.000	3.286.000	3.286.000	100,00	-
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.380.000	43.380.000	16.646.000	38,37	26.734.000
4.01.01.2.02.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.380.000	43.380.000	16.646.000	38,37	26.734.000
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	-	0,00	4.200.000
4.01.01.2.03.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000		0,00	4.200.000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.429.800	50.758.550	46.729.972	92,06	4.028.578
4.01.01..2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.665.000	11.832.000	11.832.000	100,00	-

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDUK TAHUN 2025 (RP)	ANGGARAN PERBUP 24 TAHUN 2025			
			PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%	SISA ANGGARAN (RP)
4.01.01..2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.515.800	5.709.550	5.709.550	100,00	-
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.463.000	33.217.000	29.188.422	87,87	4.028.578
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.040.000	1.040.000	1.040.000	100,00	-
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.040.000	1.040.000	1.040.000	100,00	-
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.746.000	20.442.000	9.500.000	46,47	10.942.000
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.246.000	16.942.000	6.000.000	35,41	10.942.000
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	-
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	668.290.200	645.910.200	128.081.550	19,83	517.828.650
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	668.290.200	645.910.200	128.081.550	19,83	517.828.650
4.01.03.2.03.03.01	Pengelolaan Barang dan Jasa	423.571.000	433.298.000	103.809.950	23,96	329.488.050
4.01.03.2.03.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	232.769.200	202.318.200	23.779.600	11,75	178.538.600
4.01.03.2.03.03.03	Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	11.950.000	10.294.000	492.000	4,78	9.802.000
	Jumlah	845.586.000	769.016.750	205.283.522	26,69	563.733.228

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Analisis Perubahan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2025 diperlukan perubahan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025. Analisis perubahan kinerja pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Perubahan Kinerja Pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	
				RENJA TAHUN 2025	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku		Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	-	40,00
		Terwujudnya administrasi layanan Pengadaan Barang / Jasa	Nilai Pemanfaatan sistem pengadaan	15	16,62
			Nilai Jumlah JF PPBJ dan kompetensi SDM PBJ	10	8,82
			Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa UKPBJ level Proaktif	15	17,78

Memperhatikan tabel 3.1 menunjukkan bahwa tujuan Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao tidak mengalami perubahan yaitu “**Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku**” indikator sasaran “**Terwujudnya administrasi layanan Pengadaan Barang / Jasa**” tidak mengalami perubahan.

3.2 Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program, kegiatan, sub kegiatan, target, indikator dan pendanaan pada Perubahan Renja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2025 pada tabel 3.2 berikut:

Table 3.2

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2025 s/d Bulan Mei 2025

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.0.00.0.00.08.0006	BELANJA DAERAH						845.586.000	769.016.750	(76.569.250)
4.01.0.00.0.00.08.0006	BELANJA LANGSUNG						845.586.000	769.016.750	(76.569.250)
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100	%	100	%	177.295.800	123.106.550	(54.189.250)
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100	%			
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	100	%			
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	%	100	%			
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	19	Dokumen	19	Dokumen	3.286.000	3.286.000	-

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	12	Dokumen			-
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi perangkat daerah	7	Laporan	7	Laporan	3.286.000	3.286.000	-
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	100	%	43.380.000	43.380.000	-
4.01.01.2.02.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	43.380.000	43.380.000	-
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	100	%	4.200.000	4.200.000	-
4.01.01.2.03.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	4.200.000	4.200.000	-
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	126.429.800	50.758.550	(75.671.250)
4.01.01..2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	Paket	2	Paket	23.665.000	11.832.000	(11.833.000)
4.01.01..2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	2	Paket	2	Paket	9.515.800	5.709.550	(3.806.250)

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10	Laporan	5	Laporan	62.463.000	33.217.000	(29.246.000)
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	1.040.000	1.040.000	-
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	12	Laporan	1.040.000	1.040.000	-
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	7	Unit	7	Unit	29.746.000	20.442.000	(9.304.000)
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	2	Unit	2	Unit	26.246.000	16.942.000	(9.304.000)
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	5	Unit	3.500.000	3.500.000	-
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	16,62	Skor	16,62	Skor	668.290.200	645.910.200	(22.380.000)
		Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)	8,82	Skor	8,82	Skor			
		Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	17,78	Skor	17,78	Skor			

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
		Pemerintah (UKPBJ)							
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa melalui e-procurement	100	%	100	%	668.290.200	645.910.200	(22.380.000)
4.01.03.2.03.03.01	Pengelolaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	4	Dokumen	4	Dokumen	423.571.000	418.298.000	(5.273.000)
4.01.03.2.03.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	4	Dokumen	4	Dokumen	232.769.200	217.318.200	(15.451.000)
4.01.03.2.03.03.03	Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan edvokasi pengadaan barang dan jasa	44	Orang	44	Orang	11.950.000	10.294.000	(1.656.000)
	Jumlah						845.586.000	769.016.750	(76.569.250)

BAB V

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan selama tahun 2025. Perubahan Renja Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 berpedoman kepada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025. Dalam rangka menjamin terlaksananya program, kegiatan, dan sub kegiatan serta dalam rangka pencapaian kinerja, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao berkewajiban melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien.
- b. Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam RKA Perubahan Perangkat Daerah.
- c. Menjamin konsistensi dan sinergitas antara dokumen perubahan RKPD, dokumen perubahan Renja dan perubahan anggaran.
- d. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.
- e. Perubahan Renja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip – prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ba'a, 30 Juni 2025

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Setda Kabupaten Rote Ndao,



Joni A. Adu, ST

Pembina

NIP. 19840615 201001 1 023